

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program pemerintah yang memberikan kepastian jaminan perlindungan finansial kepada penduduk Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya. JKN hadir dalam bentuk mekanisme asuransi sosial dengan memberikan cakupan manfaat kesehatan yang komprehensif baik itu promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif (Khair, 2024).

Peserta Jaminan Sosial Kesehatan per tanggal 30 September 2024, berjumlah sebanyak 277.143.330 peserta. Secara keseluruhan, sebanyak 115,7 juta penerima bantuan komitmen (PBI) dari APBN dan APBD yang berminat pada kelompok ini dibiayai oleh otoritas publik. Kemudian, terdapat 19,9 juta pekerja penerima upah (PPU) (BPJS Kesehatan, 2024).

Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya (Peraturan Pemerintah RI, 2023). Puskesmas dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memegang peranan penting. Bisa dikatakan, ada korelasi positif antara tingginya utilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan Peserta dengan optimalnya pelayanan Puskesmas yang diberikan, namun hal sebaliknya bisa terjadi bila pelayanan dirasakan kurang memadai (Hasibuan, 2020).

Sistem pelayanan kesehatan di Indonesia menjadikan Puskesmas dan JKN sulit untuk dipisahkan dan berkaitan erat satu sama lain (Mboi, 2015). Layanan kesehatan yang baik di Puskesmas akan menjadi faktor pendorong dimanfaatkan nya layanan kesehatan oleh peserta JKN, dan sangat potensial untuk kontradiktif jika pelayanan kesehatan di Puskesmas dirasa buruk atau kurang baik (Setyawan et al., 2020).

Pada tahun 2023, di Provinsi Sumatera Barat sebesar 54,85% penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir tidak melakukan berobat jalan. Jika dilihat menurut daerah, terdapat 54,83 % penduduk di perkotaan dan 54,88 % di perdesaan tidak pernah melakukan berobat jalan. Sedangkan ada beberapa alasan penduduk Sumatera Barat yang tidak berobat jalan, antara lain *unmeet need* dari pelayanan kesehatan, merasa tidak perlu diobati, malas. Untuk alasan *unmeet need* pelayanan kesehatan bisa berupa tidak punya biaya baik untuk berobat maupun transportasi, tidak ada sarana transportasi, dan waktu tunggu pelayanan yang lama (SKI Sumatera Barat, 2023).

Mayoritas penduduk Provinsi Sumatera Barat berobat jalan di praktik dokter/bidan sebesar 39,58 %. Artinya, penduduk Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 lebih banyak memilih tempat berobat atas keluhan kesehatannya di praktik dokter/bidan. Selain itu tempat berobat yang juga banyak dikunjungi penduduk Provinsi Sumatera Barat untuk rawat jalan adalah puskesmas/pustu yaitu sebesar 30,50 % (SKI Sumatera Barat, 2023).

Pemanfaatan fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas dan jejaring oleh masyarakat kota Padang (*visit rate*) tahun 2023 yaitu 2,5. Puskesmas dengan *visit rate* tertinggi adalah Puskesmas Lubuk Buaya (12,3) dengan jumlah kunjungan 901.593 dan yang terendah Puskesmas Pauh (0,8) dengan jumlah kunjungan 53.855. Jika dilihat dari kunjungan peserta JKN per Puskesmas tertinggi adalah Puskesmas Lubuk Buaya 53.500 kunjungan dan terendah di Puskesmas Air Tawar 13.571 kunjungan (Rachmayani, 2024).

Kota Padang memiliki 24 Puskesmas yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Data yang dihimpun dari DKK, pada tahun 2022 kunjungan peserta JKN sebanyak 553.535 kunjungan dari total 24 Puskesmas Lalu pada tahun 2023 memiliki jumlah kunjungan peserta JKN sebanyak 636.637 kunjungan. Jumlah kunjungan pertahun yang cukup tinggi dan terlihat mengalami kenaikan ini tidak sejalan dengan kunjungan peserta JKN yang ada di masing-masing puskesmas (Rachmayani, 2024).

Puskesmas Pauh (2024) mencatat kunjungan sakit pasien BPJS tahun 2024 sejumlah 42.124 orang. Sedangkan penduduk di Kecamatan Pauh sebanyak 63.886 orang. Angka ini justru mengidentifikasi bahwa sebagian masyarakat belum sepenuhnya memanfaatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Masih ada sebagian penduduk tidak mengakses fasilitas kesehatan BPJS selama setahun, itu bisa disebabkan karena belum terdaftar, masyarakat tidak sadar akan haknya.

Rendahnya kunjungan di Puskesmas menggambarkan kurangnya minat masyarakat untuk berobat ke puskesmas yang membuat ketidakmerataan dalam pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kurangnya

pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat memperparah kesenjangan dalam akses layanan kesehatan antara kelompok masyarakat yang mampu secara finansial dan yang kurang mampu (Hendrartini & Sulisty, 2022).

Menurut Lawreen Green dalam Notoatmodjo (2014) Notoatmodjo, menjelaskan bahwa perilaku kesehatan seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor utama: 1. Faktor Predisposisi (*predisposing factors*) Meliputi pengetahuan, sikap, keyakinan, nilai, dan persepsi yang memengaruhi seseorang untuk berperilaku tertentu. 2. Faktor Pendukung (*enabling factors*) Meliputi sumber daya atau sarana yang mempermudah atau memungkinkan seseorang melakukan perilaku kesehatan, seperti fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga medis, infrastruktur, dan juga kemampuan finansial (pendapatan). 3. Faktor Pendorong (*reinforcing factors*) Meliputi dukungan sosial, norma, dan dorongan dari orang lain, seperti keluarga, teman, atau tenaga kesehatan, yang memperkuat perilaku kesehatan (Notoadmojo, 2014).

Salah satu faktor yang memengaruhi pemanfaatan JKN adalah tingkat pengetahuan masyarakat. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang, maka semakin besar kemungkinan ia akan bertindak sesuai dengan informasi yang dimilikinya. Dalam konteks JKN, pengetahuan tentang hak sebagai peserta, prosedur pelayanan, dan manfaat program akan mendorong seseorang untuk menggunakan layanan secara optimal (Notoatmodjo, 2010).

Selain pengetahuan, sikap juga memegang peranan penting. Sikap merupakan reaksi atau respons yang masih tertutup terhadap suatu objek atau stimulus. Sikap terbentuk dari tiga komponen yaitu kognitif (pengetahuan/keyakinan), afektif (perasaan), dan konatif (niat/tindakan). Seseorang yang memiliki sikap positif terhadap layanan JKN cenderung lebih aktif dan percaya untuk mengakses layanan tersebut, dibandingkan dengan mereka yang bersikap negatif atau ragu (Wawan & Dewi, 2011).

Pendapatan atau tingkat ekonomi keluarga turut menjadi determinan dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan. Meskipun layanan JKN bersifat subsidi dan bertujuan menghapus hambatan biaya, dalam praktiknya masih terdapat biaya tidak langsung seperti transportasi, kehilangan waktu kerja, atau persepsi pelayanan buruk yang hanya bisa diatasi dengan dukungan ekonomi. Keluarga dengan pendapatan lebih tinggi biasanya memiliki akses lebih baik dan lebih aktif dalam memanfaatkan layanan kesehatan (Azwar, 2013; WHO, 2000)

Dari hasil penelitian (Amadea & Rahardjo, 2022) pada variabel tingkat pengetahuan, dari 80,2% responden yang memiliki tingkat pengetahuan cukup, ada sebanyak 57,4% responden yang sering memanfaatkan Jaminan Kesehatan Nasional. Sedangkan sebanyak 22,8% responden jarang memanfaatkan Jaminan Kesehatan Nasional. 19,8% responden yang memiliki tingkat pengetahuan kurang, ada sebanyak 3,0% responden yang sering memanfaatkan Jaminan Kesehatan Nasional dan 16,8% responden jarang memanfaatkan Jaminan Kesehatan Nasional. Dapat disimpulkan terdapat

hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan dengan pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah kerja Puskesmas Perumnas Utara.

Dari penelitian (Ilhamy & Veronica, 2023) variabel sikap responden dengan responden yang memanfaatkan jaminan kesehatan nasional diperoleh ada sebanyak 62,3% responden yang memiliki sikap negatif memanfaatkan jaminan kesehatan nasional. Sedangkan responden yang memiliki sikap positif, ada 72,7% responden yang memanfaatkan jaminan kesehatan nasional. Hasil uji statistik diperoleh nilai $p=0,030$ maka dapat disimpulkan ada perbedaan proporsi pemanfaatan jaminan kesehatan nasional antara sikap negatif dan positif (ada hubungan yang signifikan antara fasilitas kesehatan dengan pemanfaatan jaminan kesehatan nasional).

Dari hasil penelitian (Nadhiroh, 2021) Hubungan antara tingkat pendapatan dengan kepemilikan JKN sebanyak 26,4% responden berpendapatan tinggi, ada 73,6% responden berpendapatan. Dengan hasil uji chi square menunjukkan nilai p value 0,001 yang berarti terdapat hubungan antara tingkat pendapatan dengan kepemilikan JKN.

Kecamatan Pauh merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kota Padang, Sumatera Barat. Jumlah penduduk di Kecamatan Pauh pada tahun 2023 sebanyak 63.642 dengan jumlah peserta BPJS yang terdaftar 23.145 orang. Kecamatan Pauh terdiri dari 9 kelurahan dimana jumlah penduduk terbanyak yaitu Kelurahan Limau Manis Selatan sebanyak 10.617 jiwa sedangkan jumlah penduduk paling sedikit di Kelurahan Lambung Bukit yaitu sebanyak 4.227 jiwa (BPS, 2023)

Berdasarkan survei awal yang dilakukan di Kecamatan Pauh pada tanggal 18 Maret 2025 kepada 10 orang responden diperoleh data mengenai pengetahuan pemanfaatan JKN ditemukan bahwa 8 responden kurang memahami tentang program JKN, dari 10 responden 5 responden memiliki sikap yang kurang setuju atas pernyataan merasa puas menggunakan layanan kesehatan melalui JKN, sementara 6 responden memiliki pendapatan < Rp. 2.994.193 Selain itu, data juga menunjukkan bahwa 6 responden memanfaatkan JKN.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik ingin melakukan penelitian tentang “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional Di Kecamatan Pauh Tahun 2025”.

B Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apa saja faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional di Kecamatan Pauh tahun 2025 ?”

C Tujuan Penelitian

1. Umum

Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional di Kecamatan Pauh tahun 2025

2. Khusus

- a. Diketahui distribusi frekuensi pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional pada masyarakat di Kecamatan Pauh tahun 2025.

- b. Diketahui distribusi frekuensi tingkat pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan JKN di Kecamatan Pauh tahun 2025.
- c. Diketahui distribusi frekuensi sikap masyarakat dalam pemanfaatan JKN di Kecamatan Pauh tahun 2025.
- d. Diketahui distribusi frekuensi pendapatan masyarakat di Kecamatan Pauh tahun 2025.
- e. Diketahui hubungan tingkat pengetahuan dengan pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional pada masyarakat di Kecamatan Pauh tahun 2025.
- f. Diketahui hubungan sikap dengan pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional pada masyarakat di Kecamatan Pauh tahun 2025.
- g. Diketahui hubungan pendapatan dengan pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional pada masyarakat di Kecamatan Pauh tahun 2025.

D Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

- a. Bagi peneliti

Dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan serta mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan dibangku perkuliahan yang dapat menambah wawasan serta keterampilan penelitian dalam hal ilmiah khususnya tentang Jaminan Kesehatan Nasional.

- b. Bagi penelitian selanjutnya

Dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi siapapun yang akan melakukan penelitian yang serupa atau melakukan kelanjutan dari penelitian ini, sehingga menjadi tolak ukur bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis

Bagi Institusi Universitas Alifiah Padang

Dapat mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan memahami hambatan dan pendorong dalam pemanfaatan jaminan kesehatan nasional.

E Ruang Lingkup

Penelitian ini membahas “Faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional di Kecamatan Pauh tahun 2025”. Variabel independen pada penelitian ini adalah tingkat pengetahuan, sikap, dan pendapatan dan variabel dependen ialah pemanfaatan JKN. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain *cross sectional*. Penelitian ini telah dilakukan di Kecamatan Pauh tahun 2025. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang berada di Kecamatan Pauh tahun 2025 sebanyak 63.642 orang dengan pengambilan sampel 96 orang. Teknik pengambilan sampel adalah *stratified random sampling*. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner dengan metode wawancara. Analisis pada penelitian ini adalah univariat dan bivariat dengan uji statistic *Chi-square*.